

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban Webinar Series: “Melawan TPPU melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi”**

**Topik : Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Kehutanan sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi**

**Tanggal : 2 November 2020**

	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1.	<p>Jika ada usaha ekspor/import untuk furniture/meubel, apakah termasuk berisiko tinggi, dengan acuan PER-02/1.02/PPATK/02/15 (3 Feb 2015) kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usaha di bidang pengelolaan hasil hutan atau kehutanan</li> <li>- usaha perdagangan ekspor atau impor di bidang sumber daya alam hayati dan non hayati (minyak, mineral, batu bara)</li> </ul> <p>apakah perlu dilakukan EDD?</p> <p>-PT EFI - Andreas Yan -</p>	<p>Eksportir meubel (kayu), khususnya dengan skala besar, dimohon pula untuk dilakukan monitoring dan apabila terjadi transaksi keuangan mencurigakan, harap lakukan pelacakan.</p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada rencana revisi UU No.8 th 2010?</li> <li>2. Apakah terdapat daftar pelaku kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, memungkinkan di share ke PJK?</li> <li>3. Mengapa kebakaran hutan selalu berulang?</li> <li>4. Mengapa eksekusi dari 19.4 T hanya 0.1 T apa kendalanya?</li> </ol> <p>-CIMB Niafas - Entin Rostini-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejahatan korporasi TPPU bersifat terorganisir</li> </ol> <p>Peraturan utama:</p> <p>UU TPPU dan UU 18 tahun 2013, tetapi kewenangan hanya mengacu pasal 74 UU TPPU tentang penyidikan: tidak disebutkan mengenai kehutanan sehingga hal tersebut menjadi induk permasalahan sehingga dampaknya tidak memiliki kewenangan perlu dilakukan revisi peraturan</p> <p>Daftar pelaku TPA Kehutanan atau pada kasus pembalakan liar kurang dan bahkan tidak ada.</p> <p>Kasus pembalakan kayu di kepulauan raja empat tahun 2013, sudah ditangani dengan dikenakan Pasal TPPU. Perlu dilakukan pelacakan/tracing keluarga, badan hukum/perusahaan yang</p>

	Pertanyaan	Jawaban
		<p>dimiliki, pihak lainnya seperti pembeli kayu dari Pelaku.</p> <p>Kasus pembalakan liar sangat kompleks, sehingga harus dipantau dari hulu-hilir. Dari kasus yang sudah inchracht dari Kasus Minho, terdapat banyak kelebihan industri dari jenis kayu merbau, dari hasil Pengadilan Negeri Sorong dikenakan 2 tahun 5 bulan dengan biaya denda 500 Juta. Harus terdapat pembukuan, apabila melebihi kapasitas atau lainnya harus terdapat dugaan terjadinya Tindak Pidana.</p> <p>2. Kebakaran sering terjadi karena kurangnya kesadaran perusahaan tersebut, karena klausul perizinan sudah jelas untuk menjaga kondisi lingkungan dan area disekitarnya, apabila terdapat indikasi perambahan dan lainnya harus menjadi tanggung jawab perusahaan, terutama apabila terdapat faktor kelalaian, kesengajaan, atau faktor lainnya seperti angin besar.</p>
3.	<p>Bagaimana cara mengetahui TPA <i>illegal logging</i>?</p> <p>-BPR Pujon Jayamakmur - Dyan Swastikawati-</p>	<p>Narasumber KLHK:</p> <p><i>Illegal logging</i> memang banyak terjadi, apabila dilihat terdapat truck mengangkut kayu, perlu diperiksa surat perizinannya dengan menggunakan barcode, sehingga dapat langsung diketahui mengenai asal dan tujuan pengiriman. Solusi penegak hukum, semua penegak hukum harus berkerja keras untuk menjaga dari hulu - hilir, guna memberantas pembalakan liar.</p> <p>Narasumber Bareskrim:</p> <p>masing-masing punya karakteristik. Perdalam profiling terkait dengan person (misal: pengusaha di masing-masing daerah).</p>

	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
		<p>Ada 5 atensi high risk yang salah satunya adalah kehutanan.</p> <p>Unit-unit kerja di PJK juga melakukan atensi terhadap 5 kejahatan tersebut. Terkait kehutanan, transaksi yang terjadi adalah terkait kayu dan rotan. Selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu nama-nama pengusaha atau profiling terhadap nasabah, BO, dll, atau menganalisis anomali dari transaksi keuangan</p> <p>Sebagian besar yang menjadi sumber kejahatan ialah dari hulu (pembalakan liar).</p> <p>Bareskrim tidak melakukan share nama-nama pelaku kejahatan, kecuali adanya permintaan data/informasi.</p>
4.	<p>Apa saja yang perlu kita perhatikan yang harus dimiliki oleh korporasi ataupun perorangan yang hendak mengajukan kredit untuk pengelolaan hutan? apakah izin usaha perkebunan dan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sdh cukup?</p> <p>- Victor-Misda Agape-</p>	<p>Izin Usaha yang harus dipenuhi tupoksinya bukan di Departemen Pidana, namun demikian memang terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi.</p>
5.	<p>Bagaimana melihat keaslian surat izin usaha seperti amdal dimana daerah atau lokasi alamat calon debitur dekat hutan kawasan industri klu adanya pengajuan dari calon debitur yang harus dilakukan oleh PJK, trima dan haruskah perlu dilakukan edd . trima kasih</p> <p>-Bangun - PT.BPR Tahap Ganda-</p>	<p>Narasumber KLHK:</p> <p>Terkait keaslian AMDAL, terdapat barcode dan kode, dimana admin hanya satu orang pada masing-masing daerah.</p> <p>Narasumber Bareskrim:</p> <p>Ketika Pengusaha menggunakan HGU untuk mengajukan kredit, maka kredit pasti besar, dimana kredit terkait kredit agro terkait penanganan hutan. Perlu dilakukan check on the spot atau dicek ke lapangan sebelum memberikan kredit.</p>

	Pertanyaan	Jawaban
6.	<p>Izin bertanya mengenai TP Kehutanan ini, dokumen legalitas apa yang perlu kami perhatikan disaat nasabah melakukan hubungan usaha (opening account) selain AMDAL? Dan bisa beri kami pencerahan sekiranya bidang usaha apa yang perlu dimitigasi dalam TP Kehutanan?</p> <p>- PT Amantara Sekuritas Indonesia/Enrico Fernanda Saputra-</p>	<p>Narasumber KLHK</p> <p>Harus ada izin primer dan sekunder yang harus dipenuhi, banyak sekali yang harus dipenuhi.</p> <p>Banyak perusahaan yang tidak memiliki perizinan lengkap, sehingga Penyidik harus membuktikan dan harus mendalami kasus agar terlihat unsur Tindak Pidananya.</p> <p>Narasumber Bareskrim:</p> <p>Lebih aman bagi PJK untuk berkoordinasi dengan kementerian Lembaga terkait yang mengeluarkan perizinan tersebut.</p>
7.	<p>Wilayah mana saja yang terindikasi tppu kehutanan paling tinggi? Apakah ada daftar izin nama-nama usaha kehutanan yg telah secara legal diperbolehkan melakukan usahanya?</p> <p>-Danamon_Aprillia Indriani-</p>	<p>Narasumber KLHK:</p> <p>Kasus-kasus pembalakan liar lebih sering terjadi di daerah Sumatera, Papua, Surabaya. Daerah tersebut merupakan contoh wilayah <i>high risk</i>.</p> <p>Narasumber Bareskrim:</p> <p>Daerah rawan tindak pidana kehutanan: Jambi, Kalbar, Kalteng, Riau, Papua, Papua Barat, Sumsel</p> <p>Modus yang digunakan adalah dengan mencampur antara ilegal dan legal</p> <p>Banyak perusahaan yang mempunyai izin, tetapi melewati wilayah perizinan (melanggar penebangan di luar zona perizinan)</p> <p>Oleh karena itu, yang akan menjadi tindak pidana ialah didominasi oleh penebangan di luar zona perizinan</p> <p>Bahkan terdapat kasus dimana penebangan tidak sesuai dengan</p>

	Pertanyaan	Jawaban
		<p>perizinan. misal izin di area 22, tetapi menebang di area 23.</p> <p>Tindak Pidana kehutanan tidak hanya penebangan liar tetapi juga perusahaan besar yang melakukan penebangan diluar area yang memiliki izin, sehingga perusahaan mencuri dari perusahaan lain. Hal ini berarti pelaku termasuk perusahaan yang memiliki perizinan.</p> <p>PJK perlu melakukan pemantauan terkait dengan area penebangan, area tujuan, serta aliran dana.</p>
8.	<p>Apakah terdapat tipikal transaksi yang khusus yang dapat mengidentifikasi modus transaksi mencurigakan dari TP Kehutanan?</p> <p>-Bank Jtrust Indonesia – Metana-</p>	<p>Sudah ada beberapa kasus yang telah dilakukan penyidikan TPPU terkait kehutanan</p> <p>Tugas kita adalah:</p> <p>bagaimana dapat merangkai seluruh bukti sehingga seluruhnya dapat dilakukan mapping: mulai dari tindak pidana asal sampai dengan penggunaan uang hasil illegal tersebut (TPPU)</p> <p>sebagai contoh, mulai dari pembalakan liar, daerah asal, transaksi keuangan, hingga modus pencucian uang.</p>
9.	<p>Bagaimana potensi kemungkinan terjadi TPPU melalui BPR ?</p> <p>-BPR DP TASPEN</p>	<p>Contoh kasus yang sudah terjadi ialah: membayar polis asuransi untuk keluarga</p> <p>Penempatan hasil kejahatan, tidak hanya dalam bentuk rekening, tetapi juga dalam bentuk deposito dan asuransi/</p> <p>Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua bentuk lembaga keuangan dapat menjadi potensi untuk TPPU.</p>